KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

Nomor SOP	:	SEK-OT.02.02-133
Tanggal Pembuatan	:	11 DESEMBER 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	11 MARET 2026
Disahkan oleh		**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
Nama SOP	:	**PROSES PERSETUJUAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
9. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-17.PB.02.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum.
10. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mampu menggunakan Komputer/Printer/Scanner
2. Mampu menggunakan Internet
3. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel
4. Memahami Tata Naskah Dinas
5. Memahami Proses Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara
6. Memahami Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Keterkaitan:

1. SOP Proses Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Akses Internet
3. *User Account* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Peringatan :

- BMN hanya dapat diusulkan untuk pengalihan status Penggunaan setelah memperoleh penetapan status Penggunaan.
- Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan tanpa kompensasi dan tidak serta merta dilakukan pengadaan BMN pengganti.
- BMN yang dialihkan status Penggunaannya dilakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang baru.
- Dalam rangka optimalisasi Penggunaan BMN, Pengelola Barang dapat melakukan pengalihan status Penggunaan BMN tanpa adanya permohonan dari Pengguna Barang dengan memberitahukan kepada Pengguna Barang.

Pencatatan dan Pendaftaran :

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES PERSETUJUAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

No	Kegiatan	Wewenang dan Tanggung Jawab					Mutu Baku			KET
		K/L lain	Ka. Satker	Kakanwil	Sekjen	Kemenkeu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	K/L lain mengajukan permohonan Pengalihan Status Penggunaan BMN ke Kepala Satker	mulai					Surat Permohonan	1 Hari	Surat Permohonan dan Dokumen Usulan	
2	Kepala Satker Melakukan verifikasi data dan meneruskan permohonan ke Kanwil melalui aplikasi SIMAN						Surat Pengantar dan Dokumen Usulan, KIB, Dokumen Kepemilikan	3 hari	Tiket usulan pada SIMAN, Surat Pengantar, dokumen pendukung	
3	Kakanwil meneruskan usulan Pengalihan Status Penggunaan BMN ke Sekjen melalui aplikasi SIMAN						Surat Pengantar dan Dokumen pendukung	3 hari	Surat Pengantar dan Dokumen pendukung	
4	Sekjen meneruskan permohonan Pengalihan Status Penggunaan BMN ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi SIMAN						Surat Pengantar dan Dokumen pendukung	3 hari	Surat Pengantar dan Dokumen pendukung	
5	Kementerian Keuangan menerbitkan surat persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN melalui aplikasi SIMAN						Surat Pengantar dan Dokumen pendukung		Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN	
6	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penggunaan BMN dalam bentuk alih status Penggunaan BMN Kementerian Hukum kepada Kementerian/Lembaga lain						Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN	1 bulan	Berita Acara Serah Terima Penggunaan BMN dalam bentuk alih status Penggunaan BMN	

No	Kegiatan	Wewenang dan Tanggung Jawab					Mutu Baku			KET
		K/L lain	Ka. Satker	Kakanwil	Sekjen	Kemenkeu	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Sekjen melakukan penghapusan atas BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan menetapkan keputusan penghapusan BMN melalui aplikasi SIMAN						Berita Acara Serah Terima Penggunaan BMN dalam bentuk alih status Penggunaan BMN	2 bulan	Surat Keputusan Penghapusan BMN	
8	Berita acara serah terima dan keputusan penghapusan BMN dilaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru						Berita Acara Serah Terima Penggunaan BMN dalam bentuk alih status Penggunaan BMN dan Surat Keputusan Penghapusan BMN	1 bulan	Laporan	
9	Pengguna Barang baru melakukan pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN						Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN, Berita Acara Serah Terima Penggunaan BMN dalam bentuk alih status Penggunaan BMN dan Surat Keputusan Penghapusan BMN		pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN	
10	Kementerian Keuangan menerbitkan keputusan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang baru					selesai	pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN		Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Baru	

